

ABSTRAK

Pertumbuhan pariwisata yang pesat membawa konsekuensi serius terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. Kabupaten Banyumas sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam dan budaya, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian sumber daya. Dimana pariwisata berkelanjutan saat ini menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan potensi kekayaan alam dan budaya seperti Kabupaten Banyumas. Meskipun sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan budaya menjadi tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam menjawab kompleksitas pengelolaan sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran para pemangku kepentingan dalam penerapan collaborative governance, mengidentifikasi tantangan dalam integrasi antara pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif, serta menyusun model kolaborasi yang ideal dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap institusi terkait seperti Dinporabudpar, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, pelaku UMKM, serta pelaku ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance telah berjalan pada beberapa aspek, seperti terbentuknya rute wisata yang terintegrasi, keterlibatan komunitas kreatif, serta dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan subsektor unggulan seperti seni pertunjukan dan kuliner. Namun, kolaborasi tersebut masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, ketimpangan kapasitas antar pelaku, dan belum optimalnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan di Banyumas sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, akademisi, dan media sebagai elemen pentahelix. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *triple bottom line* yakni keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan pembangunan pariwisata dapat diarahkan untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian budaya serta kualitas lingkungan. Dalam konteks ini, ekonomi kreatif berperan strategis sebagai penggerak inovasi dan diferensiasi destinasi wisata yang otentik, sekaligus memberikan ruang ekspresi budaya dan penciptaan lapangan kerja lokal.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pariwisata Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif, Pembangunan Inklusif.

ABSTRACT

The rapid growth of tourism brings serious consequences for environmental, social, and cultural sustainability. Banyumas Regency, as a region rich in natural and cultural wealth, faces challenges in maintaining the balance between economic development and resource preservation. Where sustainable tourism has become a strategic issue in regional development, especially in areas with potential natural and cultural wealth like Banyumas Regency. Although the tourism sector significantly contributes to local economic growth, the negative impacts on the environment, society, and culture pose serious challenges that cannot be ignored. Therefore, the approach of collaborative governance becomes highly relevant to address the complexities of managing this sector. This research aims to examine the role of stakeholders in the implementation of collaborative governance, identify challenges in the integration of sustainable tourism and the creative economy, and develop an ideal collaboration model to support sustainable tourism development in Banyumas Regency.

The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation of related institutions such as the Department of Tourism, Culture, Youth, and Sports, the Department of Transportation, the Department of Environment, MSME actors, and creative economy actors in the region.

The research results show that the implementation of collaborative governance has progressed in several aspects, such as the formation of integrated tourism routes, the involvement of creative communities, and the support of local government in the development of leading subsectors like performing arts and culinary. However, this collaboration still faces challenges such as weak cross-sector coordination, disparities in capacity among actors, and the suboptimal role of the community in decision-making. This study found that the development of sustainable tourism in Banyumas heavily relies on the effectiveness of collaboration between the government, the private sector, local communities, academics, and the media as elements of the pentahelix. By adopting the principles of the triple bottom line, namely economic, social, and environmental sustainability, tourism development can be directed not only to improve economic welfare but also to preserve cultural heritage and environmental quality. In this context, the creative economy plays a strategic role as a driver of innovation and differentiation of authentic tourist destinations, while also providing space for cultural expression and the creation of local jobs.

Keywords: Collaborative Governance, Sustainable Tourism, Creative Economy, Inclusive Development.